ALTERNATIF BENTUK WASIAT BAGI ANAK ANGKAT ERA 4.0 (Studi Pemikiran Najmuddin Al Thufi dan Kompilasi Hukum Islam)

Akhmad Naibul Kholili

STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar, Jawa Barat
naibulkholili@gmail.com

Muhamad Ghofir Makturidi

STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar, Jawa Barat
muhamadghofir126@gmail.com

Muharir

STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar, Jawa Barat dan Mahasiswa
Mahasiswa Program Doktor Studi Islam Konsentrasi Pendidikan Islam, Pascasarjana
UIN Saizu Purwokerto, Indonesia
muharirstima1@gmail.com

ABSTRACT

Departing from the dualism of view where the ikhtariyah will which is a voluntary will and obligatory will, namely a will that is required by law, the researchers tried to uncover and explore alternative forms of wills for adopted children in era 4.0 by comparing the thoughts of Najmuddin Al Thufi and the Compilation Islamic law. The method in this study belongs to the category of library research (Library Research) where the data and data sources of researchers are obtained from various literatures (books, journals, internet, and other relevant data sources). So this research proves that in the 4.0 era as it is today, the Alternative Form of Will for Adopted Children in Era 4.0 is the concept of benefit, where this concept was coined by Najmuddin Al Thufi, namely this will can be done with a system of peace and the division of inheritance when the heir is still alive. of course by prioritizing the concept of Islam rahmatan lil 'alamin.

Keywords: Will, Era 4.0, Adopted Child, Rahmatan Lil 'Alamin, Najmuddin Al Thufi

ABSTRAK

Berangkat dari dualisme pandangan dimana Wasiat ikhtariyah yang merupakan wasiat yang diberikan secara sukarela dan wasiat wajibah yakni wasiat yang diwajibkan sesuai dengan undang-undang, maka peneliti berusaha menguak serta menggali tentang Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 dengan membandingkan Pemikiran Najmuddin Al Thufi dan Kompilasi Hukum Islam. Metode dalam penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (Library Research) dimana data dan sumber data peneliti peroleh dari berbagai literatur (buku, jurnal, internet, dan sumber data lainnya yang relevan). Sehingga penelitian ini membuktikan bahwa di era 4.0 seperti sekarang ini Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 adalah dengan konsep maslahat, dimana konsep ini dicetuskan oleh Najmuddin Al Thufi, yakni wasiat ini dapat dilakukan dengan Sistem perdamaian dan Pembagian Harta Waris saat Pewaris masih hidup yang tentunya dengan mengedepankan konsep islam rahmatan lil 'alamin.

Kata Kunci : Wasiat, Era 4.0, Anak Angkat, Rahmatan Lil 'Alamin, Najmuddin Al Thufi

A. PENDAHULUAN

Berbicara terkait kaidah dari pada wasiat secara umum sebagaimana yang ditentukan dalam KHI baik dalam Penerapan "kaidah wasiat" yang diatur KHI (Kompilasi Hukum Islam) dilakukan dengan 2 (dua) alasan. Pertama adalah untuk mengisi kekosongan hukum, dan alasan yang kedua terkait penerapan kaidah hukum wasiat pada wasiat anak angkat. Begitupun terkait Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 selain pendapat bahwa Seseorang yang membuat surat wasiat harus diserahkan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini pihak notaris dengan keadaan tertutup dan disegel untuk dirahasiakan isi yang terdapat dalam surat wasiat tersebut. Lebih lanjut menyinggung bahwa Tujuan hukum di era 4.0 (disrupsi) seperti sekarang ini adalah mewujudkan fungsi hukum yang nyata untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pembangunan industri nasional serta mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika kita telusuri bahwa Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa (1) Akibat hukum adanya pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah munculnya Panggilan, Perwalian, Hak waris, Mahramkawin. Dalam hal kewarisan, anak angkat dalam KHI adalah tidak melepas nasab dari orang tuakandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari orang tua angkatnyasesuai dengan Pasal 209 ayat. Secara praktik, pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat telah diputuskan oleh Lembaga Peradilan Agama di Indonesia (2) Kendalanya adalah masih terdapat disparitas bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Sebagian hakim Pengadilan Agama tidak mau repot secara serta merta memberikan hak waris bagi anak angkat berdasarkan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua

angkatnya, tanpa mempertimbangkan apakah pemberian maksimal tersebut telah merampas hak-hak ahli waris ataukah telah adil dan bijaksana (Subiyanti dkk., 2019).

Anak merupakan bagian dari generasi muda dimasa depan, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia yang berkualitas. Sangat diperlukan pembinaan sejak dini bagi anak yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Membentuk suatu keluarga kemudian melanjutkan keturunan merupakan hak dari setiap orang. Konsekuensi dari adanya suatu hak adalah timbulnya suatu kewajiban, yakni kewajiban antara suami isteri dan kewajiban antara orang tua dan anak. Bagi setiap keluarga, anak merupakan sebuah anugerah yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya, karena dengan hadirnya seorang anak akan melengkapi kebahagiaan sebuah keluarga. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan dapat menyebabkan perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang merupakan beberapa peristiwahukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, dikarenakan tujuan dari pada perkawinan tertentu itu belum tercapai (Soekanto & B. Taneko, 1983, hlm. 275).

Riset oleh (Faizal & Zubair, 2019) membuktikan bahwa Status hukum anak angkat dalam KHI adalah status perkawinan, anak angkat tidak termasuk golongan yang dilarang kawin dengan orang tua angkat, tidak ada hubungan dengan orang tua angkat, dan bukan mahram dari mereka. Selanjutnya, status pewarisan anak angkat adalah tidak termasuk dalam kategori orang yang berhak atas warisan. Artinya antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada hubungan pewarisan dengan orang tua angkatnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 membuka kesempatan baginya untuk menerima wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya. Status hukum pemberian wasiat kepada anak angkat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, penerima wasiat adalah anak yang harus diangkat dari kalangan kerabat dekat, jika tidak ada yang berpaling kepada anak-anak kandung tersebut,

fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak yang berada dalam golongan ekonomi lemah, atau anak temuan (al-laqith). Pemegang wasiat adalah orang yang memiliki banyak harta sehingga memungkinkan tidak mengurangi perolehan warisan harta untuk pembagian warisan.

Lebih lanjut dalam riset yang dibawakan oleh (Mayyadah, 2018) dalam risetnya diungkapkan bahwa Hakikatnya, tujuan dari pada akhir suatu hukum yakni terwujudnya perdamaian (kemaslahatan) bagi umat manusia terlepas apapun agamanya. Para yuris sepakat bahwa kemaslahatan tersebut bisabermakna sebagai proses menciptakan kebaikan dan manfaat dan bisa jugadiartikan sebagai proses mencegah kerusakan atau mafsadat. Namun yang menjadiperdebatan dewasa ini bagi para yuris adalah jika kemaslahatan tidak dapat dikonfirmasi oleh dalil-dalil nas muttafaq, baik yang termaktub dalam al- Quran, Hadits, maupun Ijma. Riset oleh (Mas'ut, 2019) menerangkan bahwa Anak angkat atau sering disebut adopsi adalah anak yang diambil dari orang lain untuk dipelihara dan dididik serta dirawat, dibiayai hidupnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa member status anak kandung kepadanya. Oleh sebab itu Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnyadan bukan kepada bapak angkatnya. Dan dalam hukum kewarisan Islam (anak angkat) tidakmendapatkan hak waris dari bapak angkatnya, akan tetapi hak waris kembali kepada bapakkandung dari anak angkat tersebutAnak angkat dalam Islam bisa mendapatkan harta dari bapak angkatnya melalui jalur 1) hibah; dan juga jalur 2) wasiat wajibah. Karena anak angkat dengan bapak angkatnya dipandang mempunyai jasa yang sangat berarti dalam kehidupan masing-masing. Oleh karena itu sebagai penggantinya hak waris anak angkat hukum Islam memberikan jalan lewat hibah dan wasiat wajibah.

Oleh sebab itu Peneliti dalam hal ini ingin menguak serta menggali tentang bagaimana Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat yang relevan di ERA 4.0 (disrupsi) seperti sekarang ini dengan menggunakan teori serta konsep Pemikiran Najmuddin Al Thufi dan Kompilasi Hukum Islam ?.

B. METODE PENELITIAN

Library Research (penelitian kepustakaan) penulis gunakan dalam riset ini. Hal ini sebagaimana riset oleh bahwa penelitian kepustakaan sumber data dapat diperoleh dari berbagai kajian literatur (buku-buku, jurnal-jurnal, internet), dan lain sebagainya. Selain itu analisis data dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis pemikiran A, Thufi tentang wasiat wajibah dan juga konsep wasiat wajibah yang ada di Kompilasi Hukum Islam, sehingga nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan bagaimana kedua konsep ini dapat dibandingkan sehingga memunculkan sebuah kesimpulan. Riset oleh (Suhada dkk., 2021) bahwa Di tengah Society 5.0 perlu strategi khusus dalam menemukan sebuah teori salah satunya adalah dengan mempertahankan, menggunakan, atau membuat teori baru dalam sebuah penelitian.

Sehingga dalam pembahasan terkait Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat yang relevan di ERA 4.0 (disrupsi) seperti sekarang ini dengan menggunakan teori serta konsep Pemikiran Najmuddin Al Thufi dan Kompilasi Hukum Islam dapat dimunculkan pandangan baru yang lebih relevan. Lebih lanjut di Era Revolusi Industri 4.0 perlu adanya revitalisasi kajian mengenai teori-teori atau konsep baru. Sehingga nantinya akan menghasilkan paradigma baru tentang keilmuan yang dapat diyakini baik itu oleh hakim dan pengguna teori tersebut. Sehingga dalam Konteks penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk inovasi dalam menunjang peradilan agama yang kredibilitas dan akuntabilitas di seluruh Indonesia yang lebih baik dan lebih efektif lagi. Lebih lanjut mengungkapkan bahwa teknik analisis data dapat dilakukan dengan cara menganalisis data secara induktif dengan demikian nantinya peneliti kaitannya dengan anak angkat ini akan menguak dengan cara induktif. Sehingga dalam hal struktur ideal dalam kehidupan masyarakat yang dicita-citakan, dewasa ini perlu memahami tentang arti dari pada kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini, dimana informasi dapat menyebar dengan mudah melalui berbagai media online tanpa batas dalam menyebarkan sebuah informasi (Rijal dkk., 2021). Pada intinya yang perlu dikedepankan dalam sebuah kajian mendalam tentang sebuah perbandingan keilmuan, adalah merupakan hasil ijtihad masing-masing kelompok ulama, yang mana mereka (ulama) telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda (Ahyani & Muharir, 2020). hal ini

terlihat dalam kajian yang hendak penulis teliti yakni tentang anak angkat, wasiat wajibah, dan juga teori kemaslahatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sekilas Biografi dan Pemikiran At-Thufy tentang Hukum Waris dan Kontribusinya di Era 4.0

Hukum kewarisan Islam sudah menjelaskan secara rinci tentang tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, harta warisan, serta hal-hal yang menghalangi ahli waris mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris antara lain dengan cara menyerahkan harta waris tersebut pada ahli waris yang berhak atau dengan wasiat apabila ahli waris seperti saudara atau kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan.

Oleh sebab itu At-Thufy yang merupakan tokoh pondasi pencipta ilmu kemaslahatan dalam bidang hukum yang berasal dari Bagdad Irak adalah seorang tokoh yuris mazhab Hanabilah. Dimana sebutan at-Thufy berasal dari desa temoat yang mana beliau lahir di desa Thufa (pinggiran kota Bagdad). Dimana beliau mengembangkan maslahat 'urfy dan maslahat syar'iy. Hal ini disebabkan menurut beliau At-Thufy terkait Maslahat menurut secara 'urf (adat istiadat) adalah sebab-sebab yang dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat, sedangkan definisi maslahat menurut Syara' yakni sebab-sebab yang dapat mengantarkan manusia kepada tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat Syariat (as-Syaari') baik dalam aspek ibadah atau al-'adah (Muhammad al-Badawy, 2000, hlm. 90). Mengenai asma (Nama lengkapnya) adalah Najmuddin Abu ar-Rabi' Sulaiman bin 'Abdul Qawy bin Abdul Karim bin Sa'id at-Thufy as-Sharsharyal-Bagdady. Selama hidupnya ia pernah menetap di Syam, Damaskus dan juga di Mesir (Sa'id, 2010, hlm. 15).

2. Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 Melalui KHI Di Era 4.0

Konsep maslahat dalam sistem kewarisan di Indonesia dapat ditemukan dalam materi Kompilasi Hukum Islam, di antaranya:

1. Sistem perdamaian

Dalam hal ini dengan adanya sistem pembagian harta waris secara damai khususnya di Indonesia menjadikan persengketaan terkait pembagian waris pada anak angkat menjadi usai. Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh nas. Namun realitanya, masyarakat seringkali melakukan penyelesaian masalah kewarisan melalui cara berdamai. Menurut Ahmad Rofiq, hal ini mungkin saja disebabkan karena terkadang ahli waris yang mendapatkan bagian yang lebih banyak, merupakan orang yang secara ekonomi telah berkecukupan, sedangkan ahli waris yang mendapatkan bagian lebih sedikit sebaliknya berhadapan dengan situasi ekonomi yang sulit (Rofiq, 2001, hlm. 198). Hal senada seperti yang diungkapkan oleh (Ahyani, Slamet, dkk., 2021) bahwa Islam tidak mengekang pada pihak tertentu, dimana konsep Islam rahmatan lil 'alamin dalam hukum Islam memberikan suatu solusi. Oleh sebab itu terkait adanya perselisihan dalam hal wasiat terutama di Indonesia ini dimana dewasa ini di zaman yang serba digital dapat dilakukan melalui beberapa konsep yang mengedepankan kemaslahatan. Terlebih dalam kebiasaan masyarakat dewasa ini di era disrupsi (4.0) seperti sekarang ini yang melakukan cara damai demi untuk mencapai keadilan dalam masalah pembagian warisan telah diakomodasi oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana termaktub dalam pasal 183 yang berbunyi : "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya". Oleh sebab itu Hadirnya kaidah fiqh yang mana digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini, dimana Kesulitan Melahirkan Kemudahan membuktikan bahwa agama Islam dengan segala perangkatnya sangat memperhatikan hal-hal perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik kebutuhan sosial maupun ekonomi (Ahyani & Mustofa, 2021). Sehingga perdamaian dalam Islam sangat keterkaitan.

2. Pembagian Harta Waris saat Pewaris masih hidup

Ijmaul Ulama telah menyepakati bahwa syarat dalam pembagian harta waris adalah meninggalnya si pewaris dan hidupnya ahli waris. Namun, terjadi sebuah kenyataan di masyarakat di mana ketika pewaris meninggal maka terjadi sengketa dan perseteruan antar ahli waris mengenai bagian yang didapatkannya

dari hartawaris tersebut. Pembagian harta waris ketika si pewaris meninggal menyebabkan sulitnya para ahli waris mengidentifikasi harta pewaris dan membagi waris dengan adil.

Realita dewasa ini di era 4.0 dimana masyarakat sudah memasuki society 5.0, dimana teknologi akan hidup berdampingan dengan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Maka dalam hal ini Kebijakan inovasi di suatu negara turut menjadi salah satu aspek yang mendukung pengembangan ekonomi dan keberlanjutan dari industri tersebut maka dengan demikian kemudian memunculkan gagasan pembagian harta waris saat pewaris masih hidup (Sugiono, 2020). Pembagian warisan ketika pewaris masih hidup dapat dilakukan dengan sistem hibah. Pasal 187 KHI menyebutkan bahwa : 1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas; a). Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang; b). Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, c. 2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Lebih lanjut dalam Pasal 188 lebih lanjut menjelaskan: Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian hartawarisannya tersebut.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suatu keluarga untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkungan keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Selain itu maksud dari pengangkatan anak disini adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian tetapi saat ini dengan adanya perkembangan motivasi dari pengangkatan anak kini telah berubah yakni demi kesejahteraan anak yang diangkat. Pengangkatan anak dewasa ini sering dilakukan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat. Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai karena pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang

melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang tidak diberi keturunan. Pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya (Basyir, 1972, hlm. 19).

3. Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 melalui Maslahat

Konsep maslahat yang telah dikemukakan at-Thufy, khususnya yang berkaitan dengan pertentangan antara nas dengan maslahat tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan dalam beberapa kasus-kasus kewarisan di Pengadilan Agama. Salah satu kasus kewarisan yang sempat menjadikontroversial adalah masalah pembagian 2:1 bagi pewaris laki-laki dan pewaris perempuan.

Dalam hal meraih suatu alternatif dalam bentuk wasiat bagi anak angkat khususnya di Era 4.0 melalui Maslahat tentunya mengalami berbagai kendala yang timbul dalam Praktek Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat, hal ini dikarenakan kurang Ketegasan hukum bagi anak angkat dalam Islam yang mana dasar ayat Al-Quran, berupa larangan memberlakukan anak angkat seperti anak kandung dilihat dari sudut pandang teori kedaulatan Tuhan, dalam al-Quran sendiri dimuat beberapa ayat yang memerintahkan orang Islam untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak dibenarkan untuk mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas, mengambil pilihan hukum lain dimana Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ketentuan hukum dianggap zhalim, kafir, atau fasiq, tanyakan pada hati nuranimu, apakah tidak termasuk umat Muhammad yang melecehkan Al-Quran (Subiyanti dkk., 2019, hlm. 316). Lebih lanjut Sibuyanti dalam memahami teori *receptie a contrario* dapat memberikan percontohan bahwa hukum Adat telah diterima oleh hukum Islam. Akan tetapi, ketentuan wasiat wajibah bagian anak angkat adalah 1/3 dari harta warisan pada awalnya banyak ditentang oleh ahli waris yang merasa dirugikan, dimana hak mereka menjadi tergantikan dengan adanya pengakuan kedudukan anak angkat menjadi ahli waris pengganti. Padahal pengharaman segala tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris mutlak.

Untuk itu sebagai solusi dari kendala tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Syari'at Islam tidak membenarkan memberi warisan kepada anak angkat, sebab anak angkat di dalam Islam tidak sama kedudukannya dengan anak kandung, oleh karenanya anak angkat tidak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya. Syari'at Islam melarang menghilangkan identitas anak angkat tersebut, anak itu harus dibangsakan kepada ayahnya. KHI cenderung memilih jalan yang kesesuaian, yakni anak angkat tidak termasuk ahli waris yang sama kedudukannya dengan anak kandung, hanya saja mereka dapat menerima wasiat dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah.

Jika kita lihat dalam suatu pernikahan yang mana fenomena pernikahan di bawah umur oleh masyarakat 5.0 dewasa ini sudah menjadi sebuah keniscayaan, dimana salah satu faktor ekonomi dan kebosanan untuk belajar online seperti sekarang ini di masa pandemi Covid-19 membuat banyak masyarakat 5.0 di Indonesia mengajukan pernikahan dini. Akibatnya, fenomena Perkawinan Di Bawah Umur oleh Society 5.0 saat ini membutuhkan pendidikan khusus bagi generasi muda bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih cerah dan bermartabat sesuai tuntutan zaman (Ahyani, Bumaeri, Hapidin, dkk., 2021). Selain itu (Ahyani, Muharir, dkk., 2020) menyinggung dalam hal Umur ideal dalam masyarakat di Indonesia jika dihubungkan dengan teori Karl Mark maka kesiapan diri dalam materi (unsure ekonomi) adalah sebagai acuan orang melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu dalam hal waris bagi anak angkat dewasa ini juga perlu di singgung (kritisi) sebagai wahana yang perlu mengedepankan konsep maslahat dimana kemaslahatan ini di Indonesia terkait status anak dalam islam maupun hukum positif adalah sebuah keniscayaan dimana Indonesia bukan negara islam. Dalam hal ini (Tabroni dkk., 2021) menyinggung bahwa kerancuan yuridis mengenai cita-cita seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan adalah kesiapan diri, begitupun pengambilan anak asuh dalam islam juga demikian.

Hal lainnya terkait konsep sebagai Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 melalui Maslahat adalah dengan adanya Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0 (Bumaeri dkk., 2020), ketika seseorang sudah menikah namun belum juga dikaruniai seorang belahan hati yakni anak, maka biasanya orang

tua akan memungut anak dari panti asuhan. Namun dewasa ini terkait Adopsi anak yang tadinya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak terhadap masa depannya. Namun pengangkatan anak tidak serta merta mengubah status hukum anak angkat menjadi darah daging sendiri. Kedudukan hukum anak angkat untuk mendapatkan hak waris tergantung pada sistem hukum apa yang digunakan untuk menyelesaikan pewarisan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat bukanlah ahli waris, tetapi ia berhak memperoleh wasiat (wasiatwajibah)(Ummah, 2005).

Berbicara mengenai definisi maslahat yang diungkapkan at-Thufy sejatinya tidaklah berbeda dengan pengertian maslahat milik Ushuliyyun lainnya. Namun berbeda dengan mayoritas ahli Ushul yang menjadi pendahulunya, at-Thufy dikenal sebagai pemikir yang memberikan porsi lebih besar terhadap nalar dalam mengungkap kemaslahatan. Hal itu tergambar dari prinsip-prinsip dasar konsep maslahat at-Thufy. Salah satunya adalah jika terjadi pertentangan antara nas dengan maslahat, maka maslahat didahulukan atas nas. Konsep maslahat at-Thufy ini tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan inspirasi bagi solusi atas kasus-kasus kewarisan di Indonesia(Mayyadah, 2018). Oleh karenanya kita sebagai muslim perlu melihat dari sisi Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia sebagaimana riset oleh (Ahyani, Bumaeri, & Hapidin, 2021) bahwa Pentingnya transformasi nilai-nilai hukum kedalam hukum positif di Indonesia dapat diwujudkan salah satunya dengan kajian-kajian mendalam dari para akademisi di bidang hukum, para pakar hukum islam (pidana islam), ahli waris islam, dan segenap warga negara Indonesia khususnya yang beragama islam, sehingga Tranformasi nilai-nilai hukum (hukum islam) dapat dimanifestasikan kedalam hukum positif (nasional) dalam bentuk melaksanakan hukum islam bagi warga negara yang beragama islam di Indonesia tanpa mendirikan negara islam.

Oleh sebab itu dalam hal anak angkat maka kedudukan anak angkat dalam sistem hukum Islam tidak memutuskan hubungan darahantara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya sehingga anak angkattidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya terkecuali melalui jalur (wasiat), yakni wasita wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Dalam hukumpositif sendiri ditetapkan bahwa anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai anakandung dari bapak angkat

sehingga anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung). Sedangkan dalam hukum adat kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya, karena beberapa daerah adat di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat (Rais, 2016). Dalam hal ini (Masyhur, 2018) juga menyinggung bahwa ketentuan pemberian hibah harta kepada anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Namun prosedur pengangkatan anak di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan status dan kedudukan anak angkat yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak angkat tetap berstatus sebagai anak kandung dari orangtua kandungnya dan kedudukan anak angkat di dalam keluarga orangtua angkatnya adalah tidak sama dengan kedudukan anak kandung dari orangtua angkatnya.

Dewasa ini dimana era serba digital perlu adanya kehati-hatian dalam pengambilan (pengangkatan) anak, yakni Ancaman pidana pada proses pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan pidana menyebutkan setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) para orang tua angkat dengan maksud baik sekalipun, akan tetapi ingin memutuskan hubungan anak yang mereka adopsi dengan orang tua kandungnya. Meskipun demikian perlu adanya kesepakatan tersebut dibuat antara orang tua angkat dengan orang tua kandung si anak. Sehingga Pasal 79 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak *seratus juta rupiah*. Sedangkan di dalam tinjauan hukum Islam terhadap ancaman pidana pada proses pengangkatan anak menurut ketentuan hukum Islam termasuk dalam kategori *ta'zīr* yakni setiap perbuatan yang tidak dikenakan hukuman had (Bakry & Arnas, 2018).

Lebih lanjut mengenai Adopsi anak angkat jika ditinjau dari Perspektif Hukum Islam adalah suatu Regenerasi (mempunyai anak) yang mana dalam hal ini menjadi salah satu tujuan dari pada Perkawinan (Syarifuddin, 2014). Sehingga dewasa ini

perlu melihat bagaimana seorang anak diambil atau diadopsi sebagai anak yang menjadi posisi seperti halnya anak kandung. Sebuah riset membuktikan bahwa banyak faktor yang menyebabkan orang yang berumah tangga ingin mempunyai anak namun bukan dari rahim isterinya sendiri, baik karena usia, pekerjaan atau kesiapannya. Untuk mengatasi masalah tersebut salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi atau mengangkat anak. Dalam lapangan hukum perdata umum, pengangkatan anak tidak saja berasal dari anak yang jelas asal-usulnya tetapi juga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (tidak jelas asal-usulnya) dalam agama Islam anak yang tidak jelas asal-usulnya ini termasuk dalam kelompok anak pungut. Islam menghendaki, bahwa pemungutan dan pengangkatan anak lebih dititikberatkan kepada kemanusiaan yaitu perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan anak tersebut, bukan karena alasan-alasan lain seperti untuk menjaga harta dan sebagainya. Surat al Ahzab ayat 4-5 ini merupakan sebuah hukum baru yang menanggapi fenomena social tentang adopsi. Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai petunjuk tatacara praktek adopsi yang benar dan adil. Bahwa Dia tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandung (sendiri). Karena dengan mengatakan anak angkat sebagai anaknya sendiri adalah merupakan kebohongan yang hanya diucapkan dimulut saja dan bukan hal yang sebenarnya. Allah SWT memerintahkan untuk memanggil anak-anak angkat itu dengan memakai (menisbatkan kepada) nama bapak kandung mereka, kecuali jika tidak diketahui siapa bapak kandungnya maka dianjurkan untuk memanggil anak angkat itu dengan sebutan saudaraku seagama atau maulaku. Dengan panggilan seperti itu maka tidak terjadi pemutusan/pengaburan hubungan dengan bapak kandungnya dan sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah(Syarifuddin, 2014).

Kesimpulan

Berdasarkan kajian *library research* diatas tentang bagaimana Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat yang relevan di ERA 4.0 (disrupsi) seperti sekarang ini dengan menggunakan teori serta konsep Pemikiran Najmuddin Al Thufi dan Kompilasi Hukum Islam ?, maka peneliti dalam hal ini menyimpulkan bahwa dualisme pandangan dimana *Wasiat ikhtariyah* melalui wasiat wajibah oleh pemberi

hibah waris (mushi) kepada ahli wasiat (Washiyyi) yang merupakan wasiat yang diberikan secara sukarela dan wasiat wajibah yakni wasiat yang diwajibkan sesuai dengan undang-undang, maka peneliti berusaha menguak serta menggali tentang Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 dengan membandingkan Pemikiran Najmuddin Al Thufi dan Kompilasi Hukum Islam. Alhasil bahwa di era 4.0 seperti sekarang ini Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 adalah dengan konsep maslahat, dimana konsep ini dicetuskan oleh Najmuddin Al Thufi, yakni wasiat ini dapat dilakukan dengan Sistem perdamaian dan Pembagian Harta Waris saat Pewaris masih hidup yang tentunya dengan mengedepankan konsep islam rahmatan lil 'alamin.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M. S. (2020). Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris. *Jurnal YUSTITIABELLEN*, 6(1), 48–68.
- Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., & Hapidin, A. (2021). Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(2), 60–70. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1118>
- Ahyani, H., Makturidi, M. G., & Muharir, M. (2021). Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 56–65. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>
- Ahyani, H., & Mustofa. (2021). Al-Masyaqqāh Tajlib Al-Taysir Implikasinya dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi dalam Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 16–43.
- Bakry, N., & Arnas, Y. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengangkatan Anak Dalam Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3961>
- Basyir, A. A. (1972). *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*. Bandung: Al-Maarif.
- Bumaeri, A. D. A., Ahyani, H., Hapidin, A., & Kusnandar, H. (2020). Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(02), 59–73.
- Faizal, N., & Zubair, A. (2019). Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam). *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)*, 3(1), 75–95.

Makturidi, M. G., Ahyani, H., & Muharir. (2021). Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Era 4.0. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 36–49.

Manurung, E. H., & Heliany, I. (2019). Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *SOL JUSTISIO*, 1(2 Oktober), 128–135.

Mas'ut, M. (2019). Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(2), Article 2.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6544>

Masyhur, M. (2018). Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 6(2), 166–176. <https://doi.org/10.12345/jir.v6i2.135>

Mayyadah, M. (2018). Konsep Maslahat At-Thufy Dan Penerapannya Dalam Kasus Kewarisan Di Indonesia. *Al-'Adl*, 11(2), 116–129.

<https://doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1245>

Muhammad al-Badawy, Y. A. (2000). *Maqashid Syari'ah 'inda Ibnu Taymiyyah*. Urdun: Dar an-Nafais.

Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata: (Analisis Komparatif). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 183–200. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232>

Rijal, M. B., Ahyani, H., & Basit, A. (2021). The Dangers of Hoaxes in Building Civil Society in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 13–34. <https://doi.org/10.2020/ijssr.v2i2.42>

Rofiq, A. (2001). *Fiqhi Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sa'id, S. bin N. bin A. A. A.-S. (2010). *Syarh Mukhtashar al-Raudah li al-Thufy*. Riyad: Dar at-Tadmuriyyah.

Soekanto, S., & B. Taneko, S. (1983). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Subiyanti, S., Santoso, B., & Purwoatmodjo, J. (2019). Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Notarius*, 12(1), 313–320. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26971>

Sugiono, S. (2020). Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0 (Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 22(2), 175–191.

<https://doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.175-191>

Suhada, D. S. D., Ahyani, H., Syamsudin, & Sartono. (2021). The Urgency Of The Role Of Organizational Motivation In Managing Private Islamic Education Institutions In Era

4.0. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 7(2), 39–58. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v7i2.623>

Syarifuddin, M. L. (2014). Adopsi Perspektif Hukum Islam. *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 1(1), 65–79.

Ummah, K. (2005). Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 12(29), 76–87. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss29.art6>